



LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Pengantar Riset

Jakarta, 17 Januari 2024

No. : 177/IBIKKG/113/1/24
Hal : Riset dan Observasi

Up  Chief Representative

Dengan hormat,

Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) kami menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

N a m a : RANIA KHOMARA
N I M : 38200291
Jurusan : Akuntansi
Nomor HP : 081513378893

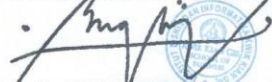
Adalah benar mahasiswa Institut Bisnis dan informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie School of Business) yang akan menyusun skripsi untuk memenuhi Persyaratan akademik dan persyaratan program S1. Untuk keperluan tersebut, yang bersangkutan harus mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut di atas dapat diberi kesempatan mengadakan **penelitian, observasi, dan wawancara** di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin guna melengkapi penyusunan skripsi dengan memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan.

Atas segala bantuan yang diberikan, disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


Dr. M. Budi Widiyo Iryanto, S.E., M.E.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 2

Ruang Kantor KP3A ABC (Thailand)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 3

Surat Izin KP3A

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (SIUP3A)

NOMOR: **[REDACTED]**

Nomor Induk Berusaha : **[REDACTED]**
 Nama Kepala Perwakilan : Lihat lampiran
 Negara Asal Kepala Perwakilan : Lihat lampiran
 Alamat Kantor Perwakilan : Lihat lampiran
 Nama Perusahaan di Luar Negeri : **[REDACTED]**
 Yang Menunjuk (Prinsipal) : **[REDACTED]**
 Alamat Prinsipal : **[REDACTED]**
 Kegiatan Usaha : **[REDACTED]**
 Tenaga Kerja : Lihat lampiran

1. KP3A Non PMSE wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L.
2. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 20 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Januari 2022

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Lampiran 4

Surat Keterangan Terdaftar KP3A

© Hak cipta

KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : ██████████

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : ██████████
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : ██████████
 Nomor Induk Kependudukan(NIK) : *
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 73200 - PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT
4. Alamat : ██████████
5. Kategori : BADAN
6. Tanggal Mulai Terdaftar : ██████████
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri ☐ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☐ PPh Pasal 29 ☐ PPh Final PPN : ☐ Pemungut PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh : ☒ PPh Pasal 4 (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☒ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
--	---

telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak ██████████



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP ██████████

Jakarta, 22 Agustus 2014

An. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,


Martini
NIP.197003271995032001





Lampiran 5

Korespondensi Melalui E-mail Dengan Konsultan Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

to me

Translate to English

Dear Rania

Ya, karena KP3A tidak boleh memperoleh penghasilan dari Ind, maka kewajiban melapor PPh Badan menjadi gugur. Secara eksplisit memang tidak ada dasar hukum bagi KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan. Pada kasus KP3A sangat sulit karena tidak adanya penghasilan, selain itu Modal disetor nya pun tidak ada krn status KP3A hanya sebatas kantor perwakilan bukan merupakan Badan Hukum di Indonesia. Kalaupun dipaksakan harus melapor SPT PPh Badan Tahunan, hanya sebatas nihil saja. Oleh karena itu sebagai pengganti kewajiban PPh Badan, KP3A mempunyai kewajiban PPh Pasal 15. Pada Surat Keterangan Terdaftar wajib pajak KP3A yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya kewajiban PPh Badan nya tidak dicontreng, artinya secara pendaftaran awal KP3A tidak mempunyai kewajiban Pelaporan PPh Badan. Sampai saat inipun, apabila mengurus administrasi pajak yang mensyaratkan adanya copy SPT Tahunan PPh Badan, maka persyaratan tersebut diganti oleh copy SPT PPh Pasal 21 bulanan

Metang agak rumit untuk kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A, perlu penafsiran dan kadangkala perlu adu argumen dengan Fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan pelaporan PPh Badan Tahunan, hal ini pernah saya alami dan lakukan.

Regards

to me

Translate to English

Hi Rania

Terima dengan dokumen perpajakan. Dokumen tersebut bersifat konfidensial/rahasia, jadi saya tidak bisa memberikan data tersebut, namun hanya bisa memberikan data sample untuk 1bulan (1 masa pajak PPh Pasal 21)--- terlampir

Untuk PPB, oleh karenanya sebagai penyewa di gedung tersebut, maka PBB nya yang bayar pihak. Thanks

Regards

to me

Translate to English

Hi Rania

Terima dengan dokumen perpajakan. Dokumen tersebut bersifat konfidensial/rahasia, jadi saya tidak bisa memberikan data tersebut, namun hanya bisa memberikan data sample untuk 1bulan (1 masa pajak PPh Pasal 21)--- terlampir

Untuk PPB, oleh karenanya sebagai penyewa di gedung tersebut, maka PBB nya yang bayar pihak. Thanks

Regards

to me

Translate to English

Hi Rania

Terima dengan dokumen perpajakan. Dokumen tersebut bersifat konfidensial/rahasia, jadi saya tidak bisa memberikan data tersebut, namun hanya bisa memberikan data sample untuk 1bulan (1 masa pajak PPh Pasal 21)--- terlampir

Untuk PPB, oleh karenanya sebagai penyewa di gedung tersebut, maka PBB nya yang bayar pihak. Thanks

Regards

to me

Translate to English

Hi Rania

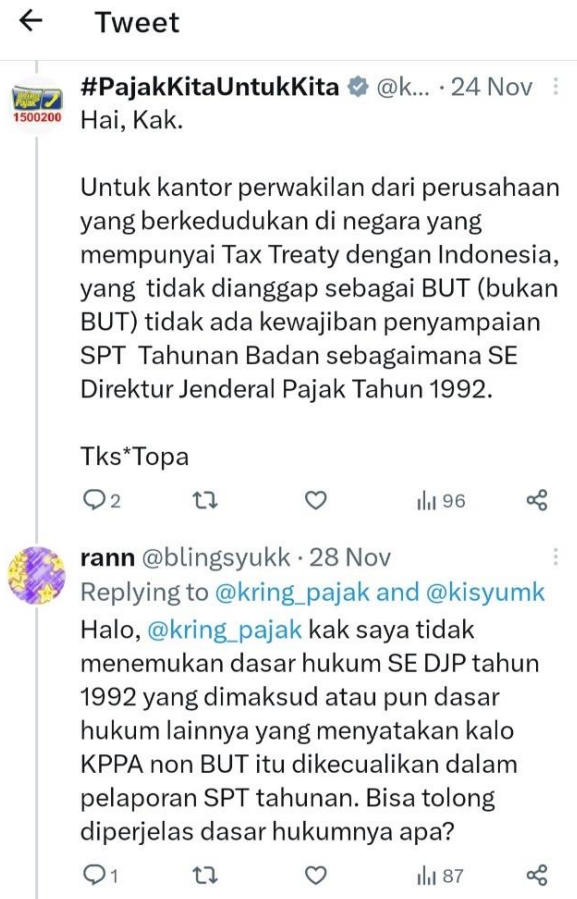
Terima dengan dokumen perpajakan. Dokumen tersebut bersifat konfidensial/rahasia, jadi saya tidak bisa memberikan data tersebut, namun hanya bisa memberikan data sample untuk 1bulan (1 masa pajak PPh Pasal 21)--- terlampir

Untuk PPB, oleh karenanya sebagai penyewa di gedung tersebut, maka PBB nya yang bayar pihak. Thanks



Lampiran 6

Wawancara Dengan Kring Pajak Melalui Sosial Media Twitter / "X"



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov
Replying to @blingsyukk and @kisyumk
Hai, Kak.
SE tahun 1992 menjelaskan tentang Pasal 21/Pasal 26 atas penggantian/imbalan yg diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dibayarkan oleh perwakilan dagang asing yang bukan BUT. (3/3)

1 61

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Di surat tersebut dijelaskan bahwa Kantor perwakilan dagang asing yang bukan BUT adalah kantor perwakilan dari perusahaan yang berkedudukan di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, yang berdasarkan Treaty tersebut tidak dianggap sebagai BUT. (2/3)

1 75

← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov
Replying to @blingsyukk and @kisyumk
Hai, Kak.
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU PPh dijelaskan bahwa Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, (1/3)

1 36

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Namun, dalam ketentuan memang tidak secara jelas disebutkan bahwa KPPA termasuk dalam Wajib Pajak luar negeri. (2/3)

1 46

← Tweet

#PajakKitaUntukKita @k... · 29 Nov
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Ketentuan mengenai penentuan Subjek Pajak dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dapat dilihat di Pasal 2 UU PPh dan penjelasannya, ya Kak. (3/3)
Tks*Dtra

1 68



rann @blingsyukk · 30 Nov
Replying to @kring_pajak and @kisyumk

Di pasal 2 UU PPh tidak ada penjelasan bahwa wajib pajak luar negeri dikecualikan untuk lapor SPT tahunan. Bisa tolong diperjelas dimana adanya pengecualian untuk KPPA non BUT untuk tidak melapor SPT tahunan

1 61

#PajakKitaUntukKita @k... · 30 Nov
Replying to @kring_pajak @blingsyukk and @kisyumk

Dalam hal Kakak memerlukan penegasan, silakan dapat meminta penegasan ke KPP terdaftar.

Tks*Fira
(3/3)

1 31

Tweet your reply



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 7

Perhitungan PPh 21

WK (THAILAND) LTD														
TAX CALCULATION ON THR - xxxxxxxxxx														
SALARY ONLY 2022														
NO	NAMA	STATUS	Salary IN Bath Thai (THB)	Exh Rate	Salary in IDR	SALARY PER YEAR	OCCUPATION EXPENSE	NON TAXABLE INCOME	TAXABLE INCOME	RATE	TAX PPh 21 PER YEAR			
3	xxxxxxxxxxx	MARRIAGE	51.986,00	440,29	22.888.916	274.666.991	6.000.000	72.000.000	196.666.991	5%,15%	23.500.049			
TOTAL			51.986				6.000.000		196.666.991		23.500.049			
SALARY & THR														
NO	NAMA	STATUS	Salary IN Bath Thai (THB)	Exh Rate	Salary in IDR	OVERTIME in IDR	SALARY PER YEAR	OCCUPATION EXPENSE	NON TAXABLE INCOME	TAXABLE INCOME	RATE	TAX PPh 21 SALARY & THR	TAX PPh 21 SALARY ONLY	TAX PPh 21 ON OVERTIME
3	xxxxxxxxxxx	MARRIAGE	51.986	440,29	22.888.916	16.735.615	291.402.606	6.000.000	72.000.000	213.402.606	5%,15%	26.010.391	23.500.049	2.510.342
TOTAL			51.986					6.000.000		213.402.606		26.010.391	23.500.049	2.510.342



1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 8

Perhitungan Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 15

REP OFFICE TAX (EXPORT SALES TAX)							
SEPTEMBER-DECEMBER 2022							
Month	Customer	Selling price in Euro	Remarks	Exchange	Selling price in IDR	Tax Rate	Tax Payable
Sep-Dec.22							
		417,42		16.162	6.746.342,04	0,44%	29.684
		348,46		16.162	5.631.810,52	0,44%	24.780
		895,50		16.162	14.473.071,00	0,44%	63.682
		800,00		16.162	12.929.600,00	0,44%	56.890
		16.920,00		16.162	273.461.040,00	0,44%	1.203.229
		2.108,79		16.162	34.082.263,98	0,44%	149.962
		1.814,19		16.162	29.320.938,78	0,44%	129.012
		1.243,50		16.162	20.097.447,00	0,44%	88.429
		2.131,30		16.162	34.446.070,60	0,44%	151.563
		2.237,00		16.162	36.154.394,00	0,44%	159.079
		6.435,00		16.162	104.002.470,00	0,44%	457.611
		513,69		16.162	8.302.257,78	0,44%	36.530
		6.894,21		16.162	111.424.222,02	0,44%	490.267
		347,00		16.162	5.608.214,00	0,44%	24.676
		68.819,06		16.162	1.112.253.647,72	0,44%	4.893.916
		325,04		16.162	5.253.296,48	0,44%	23.115
		112.995,74		16.162	1.826.237.149,88	0,44%	8.035.443
					TOTAL TAX		16.017.867

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 9

Invoice Sewa Ruang Kantor PT. DD

PT. [REDACTED]

Head Office :

Indonesia

Phone [REDACTED]

Fax [REDACTED]

Email [REDACTED]

Business Line :

Office Building

Condominium

INVOICE

Nomor : 0600064746

Kepada Yth :

JAKARTA 12780

ATTN :

No.	Description	Qty	Price	Amount
1	SPACE RENTAL [REDACTED] PERIODE : 07 AGTS 23 - 06 NOV 23	60.00	495,000	IDR 29,700,000 / 3 9.900.000
2	SERVICE CHARGE [REDACTED] PERIODE : 07 AGTS 23 - 06 NOV 23	60.00	285,000	IDR 17,100,000
Total				IDR 46,800,000
Down Payment 7.000.000				IDR 0
Tax Base				IDR 46,800,000
PPN 7.9.210				IDR 5,148,000
Grand Total 7.792.210				IDR 51,948,000

Due Date : 2023.08.31

Notes :

1. This Invoice is payable on the Due Date
2. 2.00% per month interest rate on overdue payment
3. Payment received should be net all charges

Account Information :

JAKARTA, 07 August 2023

MANAGER

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 10

Invoice Jasa Konsultan Pajak

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



INVOICE

Note:

1. PLEASE REFER TO OUR INVOICE NUMBER IN MAKING YOUR PAYMENT

Jakarta, 22 Desember 2022
No.079/IWK/XII/2022

To:



Attention :

2. PLEASE MAKE PAYMENT BY TRANSFER TO:



BILL FOR PROFESSIONAL SERVICES

DESCRIPTION	AMOUNT
- Monthly Tax & Accounting services (Desember 2022) 11% VAT	Rp. 7,000,000 Rp. 770,000
TOTAL	Rp. 7,770,000

Payment is due upon receipt of this invoice.

Yours Sincerely,



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Lampiran 11

Sampel SPT Masa Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyampaian SPT Elektronik  Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	
Nama :	[REDACTED]
NPWP :	[REDACTED]
Tahun Pajak :	2022
Masa Pajak :	11/11
Jenis SPT :	SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembetulan ke :	0
Status SPT :	[REDACTED]
Nominal :	[REDACTED]
Tanggal Penyampaian :	19/12/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik :	[REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : (mm - yyyy) H01 11 - 2022	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H02 ☒ SPT NORMAL H03 ☐ SPT PEMBETULAN KE- H06	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBERI OLEH PETUGAS) H05 H08
---	---	---

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPPN : A01	2. NAMA : A02	3. JEMBATAN : A03	4. NO. TELEPON : A04	5. EMAIL : A05
---------------	---------------	-------------------	----------------------	----------------

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	130.943.674	15.053.127
2	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA BULAN YANG BERSIFAT BERKES NAMA/UMUR	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA BULAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKES NAMA/UMUR	21-100-09	0	0	0
5	ANGGOTA DIWAN HIMPUNAN ATAU DIWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TANPAH BONUS ATAU BULAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK RAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	130.943.674	15.053.127
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)
	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01 0
	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:				
	MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)			B.02	B.03 0
	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04 0
	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05 15.053.127
	LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR				
	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN 8 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06 0
	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 16 - ANGKA 18)				B.07 0
	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08 -

HALAMAN 1

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



NPWP PEMOTONG: XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3.	PEJABAT NEGARA, PEKAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PESULUNG YANG MEMERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG BESARAN HENDAK KELUARAN NEGARAKEMAH	21-402-01	0	0	0
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Masa Pajak) 1 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV 1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
☐ 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ PEMOTONG ☐ KUASA 2. NPWP : XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX 3. NAMA : XXXXXXXXXX 4. TANGGAL : 19 . 12 . 2022 (dd - mm - yyyy) 5. TEMPAT : XXXXXXXXXX	6. TANDA TANGAN :
---	-----------------------------------

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Lampiran 12

Manuskrip Wawancara

Tanggal: 11 September 2023

Narasumber: Chief Representative Office dan Konsultan Pajak

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

K: Informan Konsultan Pajak

Pertanyaan 1-4 dijawab oleh informan Chief Representative Office ABC (Thailand)

Pertanyaan 5-9 dijawab oleh informan Konsultan pajak KP3A ABC (Thailand)

P: Apa kegiatan utama kantor perwakilan ABC (Thailand)?

C: Kegiatan penelitian pasar dan promosi produk dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan ke pabrik pengguna mesin produk ABC dan berpartisipasi pameran untuk mesin-mesin packaging.

P: Jika kegiatan kantor perwakilan hanya marketing, apakah pembelian oleh client dilakukan dengan langsung ke kantor Thailand atau melalui kantor perwakilan Indonesia?

C: Pembelian dilakukan oleh customer kami dengan menerbitkan PO yang ditujukan ke kantor pusat dan proses pembayaran ditransfer ke rekening kantor pusat. Kantor perwakilan di Indonesia, membantu mempermudah/mengarahkan proses pembelian dan pengiriman barang hingga sampai di pabrik customer ABC.

P: Darimana kantor perwakilan memperoleh pendanaan?

C: Kantor perwakilan ABC menerima biaya operasional dari kantor pusat.

P: Darimana sumber penghasilan kantor perwakilan?

C: Penghasilan dari penjualan mesin-mesin dan spare part/jasa service di wilayah Indonesia.

P: Kewajiban perpajakan apa saja yang sudah dilakukan selama ini?

K: PPh Pasal 21, PPh Pasal 15, PPh Final Pasal 4 ayat(2) dan PPh Pasal 23.

P: Sebagai pemotong, apa saja yang setiap bulan dilakukan pemotongan oleh kantor perwakilan?

K: PPh 21 atas Salary, PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas sewa kantor, dan PPh Pasal 23 atas Jasa

P: Apakah kantor perwakilan melakukan lapor SPT masa?



K: Ya, lapor SPT Masa.

P: Apakah kantor perwakilan selalu melaporkan SPT tahunan?

K: Tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan, jadi tidak lapor SPT Tahunan.

P: apakah kantor perwakilan menghitung pajak tahunan menggunakan norma (Pasal 15)?

K: Ya menggunakan norma dengan tarif PPh 15, 0,44% dari omzet bruto.

Tanggal: 23 November 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Bentuk kantor ABC (Thailand) di Indonesia itu apa?

C: Kantor perwakilan.

P: Jenis kantor perwakilannya apa?

C: Kurang tau jenis kantor perwakilannya, nanti saya kasih dokumen perizinan kantor besok, ingetin ya.

P: Yang ngurus semua perpajakan kantor siapa?

C: Kantor perwakilan ABC punya konsultan pajak, Pak SS.

P: Jadi Pak SS yang ngitung, lapor, semua urusan pajak kantor?

C: Iya semuanya diatur Pak SS, kalo mau tanya Pak SS, nanti saya kasih e-mailnya. Tanya saja.

P: Kalo di kantor pegawainya ada berapa?

C: Ada dua sales engineer sama dua service engineer.

P: Tapi di kantor selalu hadir ibu saja, apa sales engineer sama service engineer jarang ke kantor?

C: Sales engineer sebagian besar kerjanya itu sering diluar ketemuan sama customer. Service engineer juga begitu.

P: Nama jabatan ibu di kantor apa?

C: Chief representative.

P: Nama engineer di kantor perwakilan siapa aja?

C: Sales engineer ada GS sama GP. Service engineer ada VW sama RP

P: Apakah Kantor lapor SPT tahunan?

C: Lapor lah.

P: Tapi Pak SS bilang kantor tidak ada kewajiban lapor SPT tahunan.

C: oh, kurang tau ya, yang ngurus semua perpajakan Pak SS.



P: Kantor kalo mau jual ke customer tu prosesnya bagaimana?

C: jadi sales engineer kan ketemu sama customer kalo customer mau pesan nanti sama ABC (Thailand) di kantor pusat terbitin PO buat customer. Pembayaran itu langsung ke Thailand, nanti barangnya juga dikirim langsung sama Thailand.

P: Kantor perwakilan ABC berdirinya tahun berapa?

C: 2005.

P: Sudah berapa lama kantor perwakilan ABC bertempat di gedung KOI?

C: Dari sejak awal berdiri sudah disini.

P: Apakah uang sewa di gedung KOI naik setiap tahunnya?

C: semenjak masa Covid harga sewa kantor tidak pernah naik.

P: Tugas kantor itu apa?

C: Pemasaran sama riset pasar, kadang join pameran mesin. Utamanya untuk tujuan pemasaran.

P: Kantor itu tidak melakukan kegiatan penjualan sama sekali?

C: Engga, penjualan itu langsung sama kantor Thailand.

P: Di jabatan ibu tugas chief representative itu apa saja?

C: Kepala kantor perwakilan, mengatur semua keperluan kegiatan ABC (Thailand) di Indonesia.

Tanggal: 6 December 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Jika ada customer dari indonesia yang order ke ABC (Thailand) prosesnya bagaimana untuk kantor perwakilan di Indonesia?

C: Ini kantor perwakilan ya ran, kantor perwakilan ABC di Indonesia adalah kantor perwakilan. Customer order kirim PO ke kita dengan kantor Indonesia, tetapi intention nya ABC (Thailand) karena Indonesia kantor perwakilan tidak diizinkan dengan sesuatu yang berbau komersial itu sesuai peraturan pemerintah indonesia. Nah, kirim PO kita kirim PO ke Thailand. Nah, Thailand process order. Setelah ketahuan jadwalnya kapan bisa dikirim, kirimlah order konfirmasi bahwa PO nya sudah mulai di process order. Nah, term paymentnya tergantung agreement. Kadang-kadang 30% down payment, 60% setelah FAT (Trial machine), nah begitu machine sampai ke Indonesia bisa dipasang bisa jalan sisanya yang 10%. Itu biasanya term payment yang umum. Tapi ada customer



tertentu yang mereka punya kebijakan tersendiri juga, itu sesuai agreement apa kita setuju dengan term payment yang diajukan customer. Udah, begitu selesai uh, setelah mesin jadi di Thailand, di pabrik kita di Thailand, mesin dicoba biasanya customer datang, Namanya FAT Nah, begitu dicoba dan running well customer tanda tangan FAT Form. Nah, FAT Form itu biasanya juga dijadikan inclosure untuk invoice proses pembayarannya. Nah begitu dikapalkan lah dari Thailand ke Indonesia. Nah begitu sudah sampai pabrik, tinggal dipasang. Dipasang lah mesinnya, nah begitu selesai dipasang, trial, sudah finish.

P: Kalo yang di Indonesia, customer yang paling pertama mesen dulu siapa?

C: yang dulu? Customer U

P: tapi sampai sekarang Customer U masih pesan?

C: Masih, tapi mesin nya sudah jarang, sparepart masih continue. Customer lainnya yang pertama-tama itu Customer U, ada banyak sih, customer yang repeat order.

Tanggal: 8 December 2023

Narasumber: Chief Representative Office

P: Penulis

C: Informan Chief Representative Office

P: Apakah Kantor Indonesia ngurusin invoice penjualan indonesia?

C: Tugas saya itu minta invoice dari Thailand, kemudian nagih ke customer Indonesia.

P: Jadi tugas ibu itu melakukan penagihan ya?

C: Paymentnya nanti kalo misalnya belum dibayar nanti saya menagih. Thailand nanti tinggal terima bersih, Thailand cuma terbitin invoice aja yang komunikasi ke customer itu saya. Yang nyampein itu saya, shipment juga saya.

Jadi saya ingetin order saat jadwalnya pengiriman, kan setiap terima PO nanti setelah dicek sama Thailand nanti Thailand ngirim order konfirmasi bahwa ordernya itu akan diantar kapan.

Mereka kalo ga diingetin kadang-kadang kalo udah waktunya belum di delivered. Nah, itu saya ingetin tuh, nanti udh di kirimin dikasih sama Thailand shipment document. Saya kasih nanti ke customer apakah shipment document sudah oke belum. Sudah sesuai dengan izin import belum, HS code nya itu kena atas ga. Atas itu artinya pelarangan terbatas / impor restriction. Yang berbau mesin baja dengan HS code tertentu itu diizinkan ga untuk diimport. Karena Indonesia mau melindungi produk dalam negeri. Itu harus dipastikan bener-bener safe.



Kadang-kadang supaya bisa di impor kita ganti HS Code. Jadi HS code yang mirip-mirip biar bisa diimpor.

P: HS Code itu apa?

C: Harmonized System Code number, jadi setiap import barang itu dikasih HS Code. Misalnya mau import ini nanti ditanya HS Code nya apa? Masing-masing barang ada HS Codenya.

P: HS Code itu dari Indonesia?

C: Thailand yang ngatur HS Code nya.

P: Kegiatan Sales engineer itu apa saja?

C: Menawarkan mesin, memperkenalkan new product, yang menawarkan mesin. Menjelaskan secara technical, convince customer. Tidak semudah itu sebenarnya karena dia harus menguasai technical dengan baik.

P: Kalo service engineer?

C: Service engineer itu betulin dan pasang mesin. Sama kalo ada mesin problem, dia bakal suggestion part. Part ini yang harus diganti itu apa si. Tidak semudah itu sih sebenarnya, detailnya banyak seperti sales engineer.

Pertanyaan Wawancara Konsultan Pajak (Pak SS)

Tanggal: 27 November 2023 – 5 December 2023

Narasumber: Konsultan Pajak

P: Penulis

K: Konsultan Pajak

P: Salam Pak SS, Saya Rania Khomara mahasiswa semester akhir Universitas Kwik Kian Gie jurusan akuntansi perpajakan.

Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan saya seputar perpajakan KPPA ABC Thailand. Namun saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan SPT tahunan KP3A ABC Thailand.

Dari jawaban Pak SS menyatakan bahwa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai kewajiban SPT Tahunan sehingga kantor tidak melapor SPT Tahunan. Tetapi yang saya ketahui KP3A ABC Thailand mempunyai NPWP dan saya tidak bisa menemukan peraturan perpajakan/ dasar hukum yang menyatakan bahwa ada pengecualian pelaporan SPT Tahunan untuk KP3A.



Boleh saya minta diperjelas Pak mengapa KP3A ABC Thailand tidak mempunyai kewajiban untuk lapor SPT tahunan.

sekarang, terimakasih banyak Pak SS sudah mau membantu menjawab pertanyaan saya. saya tunggu balasan e-mailnya.

K: Dear Rani

KP3A hanya sebuah kantor perwakilan, dimana dalam perizinan yang diberikan oleh BKPM, KP3A tidak boleh generate income (mencari penghasilan di Indonesia), namun hanya sebatas promosi barang atau kegiatan sejenisnya, sepanjang tidak bersifat generate income. Semua penjualan ke Ind atas nama Kantor Pusat nya. Oleh karena tidak punya penghasilan di Indonesia, sehingga tidak ada kewajiban PPh Badannya, sebagai gantinya adalah PPh Pasal 15 atas ekspor Kantor Pusat ke Indonesia dikenakan atas KP3A.

Silahkan ditanyakan bila ada yg belum jelas

Demikian, terima kasih

Regards

SS

P: Salam Pak SS

Jadi, karena KP3A tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka tidak memiliki tanggung jawab untuk melapor SPT tahunan

Melanjutkan pembahasan e-mail sebelumnya, apakah ada dasar hukum untuk pengecualian pelaporan SPT tahunan ini?

Terima kasih

K: Dear Rania,



Ya, karena KP3A tidak boleh memperoleh penghasilan dari Ind, maka kewajiban melapor PPh Badan menjadi gugur

Secara eksplisit memang tidak ada dasar hukum bagi KP3A dikecualikan dari pelaporan SPT PPh Badan Tahunan, karena pada dasarnya semua WP Badan wajib menyampaikan SPT PPh Badan Tahunan. Pada kasus KP3A sangat sulit karena tidak adanya penghasilan, selain itu Modal disetor nya pun tidak ada krn status KP3A hanya sebatas kantor perwakilan bukan merupakan Badan Hukum di Indonesia. Kalaupun dipaksakan harus melapor SPT PPh Badan Tahunan, hanya sebatas nihil saja. Oleh karena itu sebagai pengganti kewajiban PPh Badan, KP3A mempunyai kewajiban PPh Final Pasal 15. Pada Surat Keterangan Terdaftar wajib pajak KP3A yang diterbitkan oleh kantor pajak, biasanya kewajiban PPh Badan nya tidak dicontreng, artinya secara pendaftaran awal KP3A tidak mempunyai kewajiban Pelaporan PPh Badan. Sampai saat ini pun, apabila mengurus administrasi pajak yang mensyaratkan adanya copy SPT Tahunan PPh Badan, maka persyaratan tersebut diganti oleh copy SPT PPh Pasal 21 bulanan

Memang agak rumit untuk kasus kewajiban pelaporan PPh Badan KP3A, perlu penafsiran dan kadangkala perlu adu argumen dengan Fiskus untuk menjelaskan bahwa KP3A tidak perlu melakukan pelaporan PPh Badan Tahunan, hal ini pernah saya alami dan lakukan.

Regards

SS

P: Baik Pak SS penjelasannya sudah jelas, terimakasih pak atas dukungannya dalam penelitian skripsi.

K: Ok Mba Rania

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 13

Turnitin

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ASPEK PERPAJAKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	12%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.kwikkiangie.ac.id	4%
	Internet Source	
2	pajaknasional.wordpress.com	2%
	Internet Source	
3	Nurkholis Rafsanjani, Benny Gunawan Ardiansyah. "ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 TERHADAP KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021	2%
	Publication	
4	e-jurnal.lppmunsera.org	1%
	Internet Source	
5	repository.unja.ac.id	1%
	Internet Source	
6	repository.ut.ac.id	1%
	Internet Source	
7	repository.uin-suska.ac.id	1%
	Internet Source	

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	needthis.org	Internet Source	1 %
9	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman	Student Paper	1 %
10	vdocuments.net	Internet Source	1 %
11	eprints.unpam.ac.id	Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Merdeka Malang	Student Paper	1 %
13	es.scribd.com	Internet Source	1 %
14	library.stiami.ac.id	Internet Source	1 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.